

Judul : Sudah ada IJD, duh, jalan rusak bahayakan warga
Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sudah Ada IJD Duh, Jalan Rusak Bahayakan Warga

WAKIL Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti penyediaan infrastruktur sebagai kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Dia menyoroti kisah seorang ibu hamil di Maros, Sulawesi Selatan, harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas karena jalan desa rusak parah.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi cermin masih timpangnya akses infrastruktur di sejumlah daerah. Kondisi jalan yang rusak tak hanya menyulitkan aktivitas warga, tapi juga bisa membahayakan keselamatan mereka saat membutuhkan pelayanan dasar seperti kesehatan.

"Tentunya, kami merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa ini. Semoga ke depan, tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami warga di Maros tersebut," ujar legislator Fraksi Partai Gerindra itu di Jakarta, kemarin.

Jika menghadapi keterbatasan fiskal, lanjutnya, Pemda bisa meminta dukungan dari Pemerintah Pusat. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Inpres tentang Jalan Daerah (IJD) yang bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah dengan ruang fiskal terbatas. "IJD ini memang dirancang agar daerah dengan keterbatasan anggaran tetap bisa memperbaiki infrastruktur penting seperti jalan desa," jelasnya.

IJD merupakan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan jalan daerah. Program ini dijalankan

pada periode 2025–2026 dengan fokus mendukung empat sektor utama. Swasembada pangan, energi, konektivitas antarwilayah, serta pengembangan kawasan pariwisata, industri, dan transmigrasi.

Dia bilang, Maros termasuk dalam wilayah yang bakal memperoleh dukungan program IJD karena memiliki kawasan pertanian strategis. Dengan demikian, pembangunan jalan tematik di daerah tersebut dapat diarahkan untuk memperlancar distribusi hasil tani.

"Di Maros juga kan daerah pertanian, maka dukungan infrastruktur tematik pastinya bisa diprioritaskan untuk memperlancar distribusi produksi tani demi membantu terwujudnya swasembada pangan," tegasnya.

Iwan Aras mendorong sinergi antara Pemkab, Pemprov, dan kementerian terkait agar pembangunan berjalan efektif. Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan program ini melalui fungsi pengawasan. "Komisi V DPR juga bisa membantu mendorong PU memfasilitasi kebutuhan pembangunan jalan di Maros atau daerah lain yang membutuhkan," ucapnya.

Belum lama ini, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pelaksanaan IJD harus segera dipercepat. Inpres yang diteken Prabowo pada 23 Juni 2025 itu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun pada tahap pertama. Anggaran IJD harus segera diserap penuh tahun ini agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. ■ PYB